

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN
KELURAHAN WATU WATU KECAMATAN KENDARI BARAT KOTA
KENDARI**

K O K O H

**H. Muh. Amir
Sartono**

Kokoh@gmail.com

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI
2018**

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masyarakat miskin Dikelurahan Watu Watu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari. (2) faktor faktor yang mempengaruhi pemerintah dalam mengatasi masyarakat miskin Dikelurahan Watu Watu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari. Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masyarakat miskin Dikelurahan Watu Watu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari. (2) untuk mengetahui keberhasilan pemberdayaan masyarakat miskin keurahan watu watu kecamatan kendari barat kota kendari. Manfaat penelitian ini : (1) Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya sosiologi dan menambah kajian tentang kemiskinan. (2) Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah sebagai dasar atau juknis pengambilan kebijakan. (3) Manfaat akademis : hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lainnya yang hendak meneliti yang berhubungan dengan judul ini.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan watu watu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* yaitu teknik penentuan informan secara sengaja yang berjumlah 20 orang dan data penelitian ini diperoleh melalui observasi (pengamatan), interview (wawancara) serta analisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program bantuan pemerintah yang dilakukan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat miskin kelurahan watu watu yaitu bantuan beras miskin (RASKIN), bantuan penerima jaminan sosial (BPJS), program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) dan program peningkatan kualitas permukiman (PPKP), sejalan dengan program tersebut ternyata akan ada aspek aspek yang dihadapi (1) Sifat kepentingan yang

dipengaruhi (2)perubahan perilaku (3)kejelasan manfaat (4)aparap pelaksana (5)dukungan sumberdaya.

Kata Kunci: Program pemberdayaan, Kemiskinan dan Perkotaan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Pemerintah dalam menangani kemiskinan dewasa ini sangat banyak menemui kendala. Disadari atau tidak kendala-kendala tersebut belum banyak yang ditangani dengan baik, hal ini menjadikan penanganan kemiskinan terhambat dan tidak sesuai dengan harapan.

Kemiskinan merupakan isu sentral dan global. Sachs, (2005) dalam Kompas (2005) menyampaikan bahwa jumlah orang miskin di dunia mencapai 1.100.000.000 orang. Kemiskinan ekstrim yang terjadi menyebabkan 8.000.000 hingga 11.000.000 orang meninggal setiap tahun dan hal tersebut berarti 20.000 orang meninggal setiap harinya. Program-program dan intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim diantaranya Program Pembinaan dan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4NK), Program Tabungan dan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Takesra - Kukesra), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) serta Program Peningkatan Kualitas Pemukiman.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Di Atas, Maka Dirumuskan Dua Permasalahan Sebagai Berikut :

1. Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dikelurahan Watu Watu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari?
2. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dikelurahan Watu Watu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari?

B. Tujuan

Berdasarkan Identifikasi Masalah Diatas, Penulis Merumuskan Tujuan Yang Ingin Dicapai Sebagai Berikut :

1. Untuk Mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dikelurahan Watu Watu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari?
2. Untuk Mengetahui Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dikelurahan Watu Watu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari?

C. Manfaat

1. Secara Teoritis, Hasil Dari Penelitian Ini Diharapkan Dapat Menjadi Referensi Atau Masukan Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Menambah Kajian Tentang Kemiskinan.
2. Secara Praktis, Hasil Dari Penelitian Ini Diharapkan Dapat Menjadi Masukan Bagi Pemerintah Sebagai Dasar Atau Juknis Pengambilan Kebijakan.

3. Manfaat Akademis : Hasil Penelitian Ini Dapat Dijadikan Sebagai Bahan Referensi Bagi Peneliti Lainnya Yang Hendak Meneliti Yang Berhubungan Dengan Judul Ini.

TIJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat sangat relevan sebagai paradigma kebijakan desentralisasi dalam penanganan masalah sosial termasuk masalah kemiskinan. Pendekatan ini menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya materi dan nonmaterial. Korten (dalam Hikmat, 2004:15-16) menyatakan bahwa ada tiga dasar untuk melakukan perubahan-perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat :

1. Memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, dan untuk memecahkan masalah-masalah mereka sendiri di tingkat individual, keluarga, dan komunitas.
2. Mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi-organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem organisasi.
3. Mengembangkan sistem-sistem produksi-konsumsi yang diorganisasi secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.

B. Konsep Kemiskinan

1. Pengertian kemiskinan

Sasaran utama dari pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat miskin, yang diharapkan dengan adanya upaya melalui proses pemberdayaan masyarakat ini, masyarakat miskin dapat lebih mampu dan berdaya. pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai strategi untuk mencapai tujuan meningkatnya kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin. masyarakat miskin merupakan sumber daya manusia yang berpotensi untuk berpikir dan bertindak yang pada saat ini memerlukan “penguatan” agar mampu memanfaatkan daya (*power*) yang dimiliki. membahas konsep mengenai kemiskinan tidak terlepas dari perdebatan panjang soal definisi, indikator dan segala hal yang terkait dengan masalah kemiskinan.” kemiskinan bisa dikatakan, adalah konsep yang cair, tidak pasti, dan meultidimensional (Mukhtar, 2003). oleh karena itu, banyak terminologi mengenai kemiskinan yang dikemukakan oleh pakar secara individu maupun secara kelembagaan. mendefinisikan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh dimensi yang kita gunakan.

C. Program Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan

Dalam rangka pengentasan kemiskinan upaya yang dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam

sumber-sumber ekonomi seperti modal, teknologi, informasi lapangan kerja dan pasar. Masukan berupa upaya-upaya pengentasan kemiskinan yaitu menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas layanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan dan pemasaran dimana terkonsentrasi penduduk yang keberadaannya amat kurang. Untuk itu perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

D. Kemiskinan Diperkotaan

Dalam wacana *urban poverty*, Ellen Wratten menyatakan terdapat tiga hal pokok yang harus menjadi perhatian dan isu bersama. Pertama, bagaimana dan oleh siapa kemiskinan perkotaan didefinisikan, serta bagaimana kita mengukur tingkat kemiskinan tersebut? kedua adalah Wratten mempertanyakan apa perbedaan kemiskinan perkotaan dengan kemiskinan secara umum, apa bedanya dengan kemiskinan di perdesaan misalnya? terakhir adalah bagaimana prinsip-prinsip kemiskinan perkotaan dipahami, dari sisi wilayah serta dari sisi kebijakan penanggulangannya.

E. Strategi Kebijakan

Chandler & Plano dalam kamus “wajib” Ilmu Administrasi Negara, *The Public Administration Dictionary*, mengatakan bahwa: “Public Policy is strategic use of resources to alleviate national problems or governmental concerns”. Secara sederhana dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Chandler & Plano lalu membedakannya atas empat bentuk, yakni: regulatory, redistributive, distributive, dan constituent.

F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi implementasi kebijakan Pemerintah

Dalam studi kebijakan, dipahami benar bahwa bukan persoalan yang mudah untuk melahirkan satu kebijakan bahkan untuk kebijakan pada tingkatan lokal, apalagi kebijakan yang memiliki cakupan serta pengaruh luas, menyangkut kelompok sasaran serta daerah atau wilayah yang besar.

Pada tatanan implementasi pun, persoalan yang sama terjadi, bahkan menjadi lebih rumit lagi karena dalam melaksanakan satu kebijakan selalu terkait dengan kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri, dengan kompleksitasnya masing-masing. Tidak saja dalam proses implementasi, dalam realitas ditemukan juga walaupun kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi mengalami hambatan dalam implementasi (tidak atau belum dapat diimplementasikan) karena dihadapkan dengan berbagai kesulitan atau hambatan.

G. Kerangka Pikir

Penelitian ini berusaha mendeteksi sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan dikelurahan watu watu kecamatan kendari barat.

Dalam penelitian ini di kembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti melakukan penelitiannya. melalui kerangka pikir ini, maka tujuan yang dilakukan peneliti semakin jelas dan telah terkonsep terlebih dahulu.

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

penelitian ini dilakukan di kelurahan watu-watu kecamatan kendari barat kota kendari. dengan pertimbangan lokasi tersebut terdapat sejumlah program sebagai upaya pengantasan warga miskin. dengan penelitian ini diharapkan penulis dapat mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan kelurahan Watu Watu. kelurahan watu watu merupakan salah satu dari sembilan kelurahan yang terletak di kecamatan kendari barat kota kendari provinsi sulawesi tenggara. kelurahan watu watu terdiri dari 16 rukun tetangga dan 06 rukun warga. dengan jumlah penduduk 4.999 jiwa, berasal dari 1.146 kepala keluarga, jumlah penduduk miskin kel watu watu kecamatan kendari barat kota kendari berdasarkan data yang ada di kantor kelurahan watu watu 342 kk luas wilayah 3.349 kilo meter persegi (data terhitung november 2016).

B. Informan Penelitian

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik secara sengaja (*Purposive Sampling*), dengan pertimbangan informan dalam penelitian ini penetapan keluarga miskin berdasarkan pendataan indikator keluarga miskin dan bersangkutan bersedia untuk diminta keterangan atau informasi membantu penelitian ini “ Strategi Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan”.

Informan utama dalam penelitian ini 16 kepala keluarga (KK) miskin dan informan pendukung yaitu kepala kelurahan, sekretaris kelurahan, ketua LPM dan 1 orang tokoh masyarakat. Jadi, jumlah keseluruhan informan dalam penelitian ini berjumlah 20 orang.

C. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data yang dimana data kualitatif yang disajikan dalam bentuk narasi untuk mendeskripsikan mengenai strategi pemberdayaan masyarakat terhadap komunitas miskin perkotaan. Hal ini akan dipaparkan berdasarkan konteks ilmiah dilokasi penelitian (*natural setting*).

D. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari :

1. Data primer, yaitu data telah diperoleh dari sejumlah informan melalui hasil *interview* (wawancara), dan *observasi* (pengamatan) yang berhubungan dengan penelitian ini.
2. Data sekunder, yaitu data telah diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, laporan-laporan hasil penelitian, informasi-informasi tertulis, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (*field Research*) yaitu pengumpulan data secara langsung dilapangan guna memperoleh data yang akurat, sebagaimana yang dikatakan oleh Sugiyono (2011) teknik pengumpulan data merupakan langka yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode yang digunakan :

1. Studi pustaka (*library study*), yaitu melakukan penelusuran pustaka dengan mengkaji sumber-sumber pustaka atau dokumentasi tertulis seperti kepustakaan konseptual berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli, yang memberikan pendapat, penalaran, teori-teori atau ide-ide relevan dengan permasalahan penelitian.
2. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian lapangan. Penelitian ini meliputi teknik berikut :
 - a. Pengamatan (*Observasi*), yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian yang berhubungan dengan strategi pemberdayaan masyarakat terhadap komunitas miskin perkotaan.
 - b. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Setyadin dalam Gunawan (2013:160)
 - c. Dalam penelitian yang akan di lakukan, peneliti menggunakan pedoman wawancara tak berstruktur dengan tujuan agar memperoleh keterangan yang terinci dan mendalam mengenai pandangan informan tentang hal-hal yang sedang diteliti. Nasution(2006:73) menyebutkan tujuan wawancara ialah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dalam hati orang lain, yaitu hal-hal yang tidak dapat diketahui melalui observasi.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data telah dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu data disajikan dengan menjelaskan dan menggambarkan keadaan sesungguhnya terjadi di lokasi penelitian. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Miles dan Haberman (Sugiyono,2011) yang menyatakan kegiatan analisis data pada penelitian kualitatif melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan proses yang berlangsung sepanjang penelitian, dengan menggunakan seperangkat instrumen yang telah disiapkan, guna memperoleh informasi data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Dalam proses pengumpulan data ini, seorang peneliti dapat melakukan analisis secara langsung, sesuai dengan informasi data yang diperoleh di lapangan.

2. Reduksi Data
Reduksi data dilakukan dengan penyeleksian informan, pencacatan/perekaman informasi data ke dalam pola yang telah ditetapkan, pemilihan terhadap dokumen yang diperlukan, serta pengembangan proposisi-proposisi. Dalam reduksi data ini dilakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan konservasi data kasar yang muncul dari catatan –catatan tertulis lapangan.
3. Penyajian Data (*Display Data*)
Penyajian data dilakukan dengan cara deskriptif, yaitu merangkai dan menyusun informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan atau penyederhanaan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif, dan mudah dipahami. Penyajian data menggunakan teks naratif yang dilengkapi dengan jaringan kerja yang berkaitan sehingga semua informasi yang disusun mudah dilihat dan dimengerti.
4. Penarikan Kesimpulan (*verifikasi*)
Penarikan simpulan yaitu suatu kegiatan konfigurasi yang utuh atau tinjauan ulang terhadap catatan-catatan lapangan dengan maksud untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul di lokasi penelitian setelah memiliki landasan yang kuat, simpulan dapat disusun lebih rinci dan utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Kelurahan watu watu merupakan salah satu dari sembilan kelurahan yang terletak di kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Kelurahan watu watu terdiri dari 16 Rukun Tetangga dan 06 Rukun Warga. Dengan Jumlah Penduduk 4.999 jiwa, berasal dari 1.146 Kepala Keluarga, luas wilayah 3.349 km² (data terhitung November 2016).

Kelurahan watu watu berbatasan dengan :

- Sebelah Utara, berbatasan pegunungan Nipa-nipa
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kelurahan Tipulu
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kelurahan Kemaraya
- Dan juga kelurahan lahundape
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Teluk Kendar

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kelurahan Watu watu sebanyak 4.999 jiwa yang terdiri dari 1.146 kepala keluarga (kk). Dengan jumlah yang demikian maka tak mengherankan apabila ada masyarakat yang tergolong miskin atau tidak berkecukupan dalam konteks ekonomi meskipun tidak semuanya.

3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kelurahan watu watu yang ditinjau menurut jenis kelamin maka yang dimana penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2.511 jiwa dengan presentase 50.24% sedangkan yang berjenis kelamin perempuan yakni 2.488 jiwa dengan presentase 49.76%. Jadi berdasarkan data yang ada maka dapat disimpulkan penduduk Kelurahan watu watu lebih banyak yang berjenis kelamin laki-laki hal ini dibuktikan dengan jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada penduduk yang berjenis kelamin perempuan.

4. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Jadi jumlah penduduk Kelurahan Watu watu berdasarkan tingkat pendidikan berjumlah 2.955 jiwa/orang yang dimana lebih banyak yang berada pada tingkat SMA. Kemudian pendidikan Strata II dan III merupakan tingkat pendidikan yang paling sedikit, namun jika dilihat dari jenjang maupun dari segi kualitas maka ini dapat membantu proses pembangunan wilayah ini terkhusus pada bidang pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat miskin yang ada dapat terbantu dengan adanya orang-orang yang berada pada jenjang pendidikan teratas disekitar mereka, dengan cara menghadirkan ide maupun gagasan guna membantu mereka yang kurang mampu dari segi ekonomi.

B. Bantuan Penerima Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS)

Program bantuan penerima jaminan sosial kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses rakyat miskin terhadap layanan kesehatan gratis. Program ini telah menjadi bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang bertujuan untuk memberi perlindungan sosial dan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat (Kementerian Kesehatan, 2010). sama halnya yang terjadi dikelurahan watu watu kecamatan kendari barat kota kendari .

C. Program Penanggulangan Kemiskinan Di perkotaan (P2KP)

Sebagaimana kita ketahui bahwa Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan di Kelurahan Watu watu merupakan perencanaan pembangunan yang merupakan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dilakukan sebagai bentuk upaya untuk melakukan perubahan-perubahan menjadi lebih baik. Karena perubahan yang dimaksud adalah menuju arah peningkatan dari keadaan semula, menjadi lebih baik dengan melalui usaha yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Berhubungan dengan hal tersebut maka perencanaan pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan merupakan suatu kegiatan yang rasional dan dilakukan oleh seluruh lapisan dan segenap golongan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dari keadaan yang

sebelumnya, dimana pembangunan tersebut menyangkut perubahan dari suatu kondisi yang dinilai belum mapan, baik secara materil dan spiritual, demikian pula dengan orientasi dari PNPM.

D. Program Peningkatan Kualitas Permukiman (PPKP)

Selanjutnya Program Pengentasan Kemiskinan Di Perkotaan (PPKP) yang dilaksanakan di Kelurahan watu watu , juga memprioritaskan kinerjanya di bidang lingkungan. Lingkungan yang dimaksud berkaitan dengan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur mempunyai peranan yang vital dalam pemenuhan hak dasar rakyat. Infrastruktur adalah katalis pembangunan.

E. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Imlementasi Kebijakan Pemerintah

a. Faktor Kepentingan

Seperti yang kita ketahui Dalam proses implementasi satu kebijakan publik seringkali menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan kelompok lain. masalah yang muncul kemudian berasal dari orang-orang yang merasa dirugikan. Upaya untuk menghalang-halangi, tindakan komplain, bahkan benturan fisik bisa saja terjadi. hal tersebut mungkin biasa terjadi didaerah lain akan tetapi hal tersebut berbeda dengan yang terjadi di kelurahan watu-watu dari semua informan yang saya dapati . terkait dengan imlementasi kebijakan RASKIN,BPJS,P2KP,dan PPKP tidak satupun warga yang mengeluh atau tidak setuju dengan pengimplementasian kebijakan tersebut justru sebaliknya mereka sangat berterimah kasih dengan yang pemerintah berikan kepada mereka.seperti hasil interview saya kepada salah satu warga RT 02 RW 04 penerima bantuan P2KP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Kelurahan Watu Watu Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari mengenai Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan, program Pemerintah Untuk Mengatasinya dan faktor faktor yang mempengaruhi, maka peneliti berkesimpulan bahwa Program Penyaluran beras untuk keluarga miskin merupakan program yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga miskin sangat-sangat membantu sekali,selain itu Bantuan Penerima Jaminan Sosial (BPJS). Program ini merupakan program bertujuan memberi perlindungan sosial dan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat yang telah tersalurkan keseluruh indonesia termasuk juga didalamnya kota kendari (kel watu watu) sudah sangat membantu.kemudian Program Penanggulangan Kemiskinan Diperkotaan (P2KP), telah tersalurkan dengan baik salah satu program yang sangat membantu masyarakat kelurahan watu watu karena telah menyentuh warga yang sangat membutuhkan dikelurahan watu watu. dan juga Program Peningkatan Kualitas Permukiman (PPKP),

meningkatkan kualitas pemukiman merupakan program yang sangat mendukung perbaikan lingkungan juga mengurangi kekumuhan di suatu lingkungan dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat subyek dalam proses upayanya, diharapkan membutuhkan kerja sama pemerintah dan masyarakat setempat agar program tersebut dapat terealisasi dengan baik .dan telah tersalurkan dengan baik salah satu program yang sangat membantu masyarakat kelurahan watu watu yaitu drainase yang mempunyai fungsi mengatur jalannya air dari hujan untuk kemudian diteruskan ke pembuangan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kelurahan watu watu.

B. Saran

Dalam menghadapi kemiskinan di zaman global diperlukan upaya-upaya yang lebih kreatif, inovatif dan eksploratif. Baik pemerintah pusat maupun daerah hendaknya perencanaan pelaksanaan kegiatan pengentasan kemiskinan khususnya dapat melibatkan peran masyarakat setempat terutama dalam pelaksanaan persiapan pendataan dalam hal ini penetapan indikator sehingga dapat menghasilkan data yang berasal dari keadaan dari sumber masalahnya yaitu tempat dan kondisi dari masyarakat itu sendiri berada. artinya formulasi atas indikator dan penetapan RTS kemiskinan tidak akan efektif dan tidak akan tajam apabila pemerintah yang lebih tinggi atau yang lebih jauh kendalinya yang membijaksanai sebab Indonesia terdiri dari banyak pulau, budaya yang sangat banyak dan beragam otomatis tingkat atau ukuran kemiskinan akan beragam dan tidak akan sama. Di satu sisi anggaran merupakan salah satu hal yang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan benar-benar merasakan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Selain itu, kapasitas penyelenggara juga perlu diperhatikan agar proses pengaplikasian program dapat terlaksana sebagaimana mestinya bukan menghadirkan seseorang untuk menjalankan tugas dan amanahnya namun tidak memiliki technical skill yang baik. Dalam menghadapi kendala-kendala dan permasalahan yang ada, maka diperlukan kreativitas pengurus maupun anggota kelurahan untuk terus melaksanakan program. Pendekatan multipihak dengan melibatkan semua pihak, dapat menyelaraskan persepsi tentang tujuan memberdayakan masyarakat. Selain itu dengan lebih digiatkannya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dari perogram perogram bantuan pemberdayaan yang akan diberikan, akan lebih memberikan pengertian kepada masyarakat untuk mau berkerja sama bersama dalam hal pendataan yang dilakukan pihak kelurahan. Agar sesuai rumah tangga sasaran dan perogram bantuan pemberdayaan yang akan diberikan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Khairil. 2009. "*Solusi Kemiskinan*". <http://sahabatbaru.blogspot.com> (diakses pada 5 September 2016)
- Agustino, Leo.2006. *Dasar-Dasar kebijakan publik*. Bandung:Alfabeta
- BPS (*Badan Pusat Statistik*).2008. Jumlah Penduduk miskin Indonesia.
- BPS (*Badan Pusat Statistik*).2016. Jumlah Penduduk miskin Indonesia.

- Badan Pusat Statistik, 2016. *Penduduk Miskin Indonesia (Poor Population)*. <http://www.bps.go.id/Brs/id/1378> (diakses pada 3 januari 2017)
- Badan Pusat Statistik, 2016. *Penduduk Miskin berita resmi provinsi Sulawesi Tenggara*. <http://www.bps.go.id/Brs/view/id/284> (diakses pada 3 januari 2017)
- Bank dunia. 2000. “*A Sourcebook for Poverty Reduction Strategies*”. <http://www.worldbank.org> (diakses pada 7 September 2016)
- BAPPENAS. 2002. *Direktori Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Periode 1996-2001*, hal 3-8. Jakarta.
- Bappenas. 2002. *Kemiskinan*. [http://www. Bappenas.co.id](http://www.bappenas.co.id) (diakses pada 7 September 2016).
- Bappenas, 2004. *Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta.
- BKKBN. (2003). *Program keluarga berencana nasional*. Jakarta: BKKBN
- BPS. 1997; 1999; 2001; 2002. *Statistik Indonesia*. <http://www.bps.go.id> (diakses pada 1 September 2016)
- BPS Pusat Statistik dan Depsos/Departemen Sosial (2002), *Penduduk Fakir Miskin Indonesia 2002*, Jakarta: BPS
- Chambers, Robert, (1983). *Rural Development, Putting the Last First*, Longman : London.
- Dunn N, William. 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Darwin , 1999 . <http://ringkasteori.blogspot.co.id> (diakses pada 05 juli 2012)
- Ginancar, 1997. “*Pembangunan Masyarakat Desa, Asas, Kebijaksanaan, dan Manajemen*”. Yogyakarta: Media Widya Mandala.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013
- Harahap, Sofyan Syafri. 2006. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hikmat, Harry, (2004). *Strategi Pembedayaan Masyarakat*. Penerbit Humaniora Bandung.
- Jhingan, M. L, 2002. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Kadji, Yulianto. 2012. *Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya*. [Http://repository.ung.ac.id](http://repository.ung.ac.id) (diakses pada 13 September 2016)
- Kartasasmita,G.(1996). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat*. Bandung. ITB.
- Khomarudin. 1997, *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*, Jakarta: Yayasan Real Estate Indonesia, PT. Rakasindo, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, masalah dan Kebijakan, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Kuncoro-Jakto, D. (1994). *Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Mazmanian, D dan Sabatier,P.A.(1981), *Effective Policy Implementation*, Lexingtone Mass DC : Heath.
- Milles, MB & Hubberman, AM, (1992) *Analisis Data Kualitatif Terjemahan* oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto, UI Percetakan, Jakarta.
- Moeljarto, (1995). *Politik Pembangunan Sebuah Analsis Konsep, Arah dan Strategi*, PT. Tiara Wacana : Yogyakarta.
- Mujiyadi. B dan Gunawan. 2000. "*Pemberdayaan Masyarakat Miskin*". Jakarta: Batilitbang Depsos.
- Mukhtar. 2003. Strategi Pemberdayaan Berbasis kelembagaan Lokal dalam Penanganan Kemiskinan Perkotaan: Kasus Implementasi P2KP di Desa Sukadanau.
- Namba (2003) *Pendekatan Ekosistem dalam Penanggulangan Kemiskinan: Refleksi Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi Tengah*. Jurnal Ekonomi Rakyat. Edisi Maret 2003 www.ekonomirakyat.com.
- Nasikun 2005, *Paradigma pembangunan*, CV Alva-beta Bandung.
- Nasution, s. (2006), Nasution S. (2006). *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Chaizi, Nasucha. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grafindo.
- Prijono, Pranaika. 1996. "*Pengembangan Sumberdaya Manusia: Konsepsi Makro untuk Pelaksanaan di Indonesia*". Jakarta: Izufa Gempita.
- Papilaya, Eddy. 2004. "*Rekonstruksi upaya penanggulangan kemiskinan*", <http://www.oocities.org> (diakses pada 30 Maret 2013).
- Rondinelli, (1990:91) "*Strategi Pemberdayaan Masyarakat Miskin*" <http://www.airlanggapress.com> (diakses pada 05 September 2016).
- Salim, Agus. 2002. *Perubahan Sosial*. Yogyakarta : PT Tiara Wacana.
- Sarman, Mukhtar dan Sajogyo. 2000. *Masalah Penanggulangan Kemiskinan*. Yogyakarta: Penerbit Puspa Swara

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus Tahun 2000, dalam Pasal 28 H ayat (1)